

RINGKASAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh indeks persepsi korupsi dan faktor lainnya terhadap kemiskinan yang terjadi di Indonesia pada rentang waktu tahun 2001 hingga tahun 2021. Penelitian ini mengambil judul: “Analisis Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Pengangguran, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia, tahun 2001-2021”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh korupsi, IPM, pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia pada rentang waktu 2001-2021. Jenis penelitian merupakan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series* pada rentang waktu 2001-2021 dan data sekunder yang bersumber dari *Transparency International*, Badan Pusat Statistik, dan *United Nations Development Programme* (UNDP). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan model lag satu tahun.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Korupsi yang menggunakan waktu lag satu tahun berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2001-2021. (2) Dikarenakan adanya data *outlier multivariat* yang menyebabkan terjadinya multikolinearitas terhadap variabel independen lain, sehingga peneliti mengeluarkan variabel IPM dari model regresi. (3) Pengangguran yang menggunakan waktu lag satu tahun berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2001-2021. (4) Inflasi yang menggunakan waktu lag satu tahun berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2001-2021.

Implikasi pada penelitian ini adalah pemerintah perlu lebih bekerja keras dan bertanggung jawab dalam memberantas korupsi yang marak terjadi di Indonesia dengan cara yaitu menghapus segala bentuk korupsi yang ada di Indonesia dengan memperbaiki sistem perizinan sehingga tidak akan menimbulkan celah untuk terjadinya tindak korupsi dan pemerintah juga perlu memperkuat supremasi hukum yang ada sehingga para pelaku koruptor akan di berikan hukuman yang sesuai dan tidak ada lagi para pelaku koruptor yang kebal akan hukum. Selain itu pemerintah dapat melakukan alokasi dari pengeluaran dana APBN yang ada untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakatnya sehingga memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik dan membuat tingkat produktivitas masyarakat akan meningkat. Dan yang terakhir pemerintah perlu menjaga stabilitas inflasi dengan menggunakan kebijakan fiskal kontraktif yaitu dengan menaikkan pajak, diantaranya yaitu pajak penghasilan bagi masyarakat yang berpenghasilan tinggi, lalu menaikkan pajak barang mewah. Hasil dari pajak tersebut dapat dialokasikan untuk meningkatkan pendidikan dan untuk membuka balai latihan kerja, sehingga angka kemiskinan akan berkurang.

Kata Kunci: Kemiskinan, Korupsi, IPM, Pengangguran, Inflasi

SUMMARY

This research analyzes the effect of corruption and other factors on poverty that occurred in Indonesia in the period from 2001 to 2021. This research takes the title: "Analysis of the Effects of Corruption on Poverty in Indonesia, 2001-2021".

The purpose of this research is to analyze the effect of corruption, HDI, unemployment and inflation on poverty in Indonesia in the 2001-2021 period.

This type of research is quantitative. The data used in this research is time series data for the period 2001-2021 and secondary data sourced from Transparency International, the Central Bureau of Statistics, and the United Nations Development Program (UNDP). The data analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis using a one-year lag model.

The results of this research are: (1) Corruption which uses a one-year lag has a positive and significant effect on poverty in Indonesia in 2001-2021. (2) Due to the presence of multivariate outlier data which causes multicollinearity to other independent variables, the researchers excluded the HDI variable from the regression model. (3) Unemployment using a one-year lag has a positive and significant effect on poverty in Indonesia in 2001-2021. (4) Inflation using a one-year lag has a positive and significant effect on poverty in Indonesia in 2001-2021.

The implication of this research is that the government needs to work harder and be more responsible in eradicating corruption that is rife in Indonesia by eliminating all forms of corruption that exist in Indonesia by improving the system so that it will not create loopholes for acts of corruption and the government also needs to strengthen supremacy. existing laws so that corruptors will be given appropriate punishment and no more corrupt perpetrators will be immune from the law. In addition, the government can allocate funds from the existing APBN expenditures to improve the quality of education and health for its people so that they have good quality human resources and increase the level of community productivity. And finally, the government needs to maintain inflation stability by using a contractionary fiscal policy, namely by increasing taxes, including the income tax for people with high incomes, then increasing the tax on luxury goods. The results of these taxes can be allocated to improve education and to open works training center so that the poverty rate will be reduced.

Keywords: Poverty, Corruption, HDI, Unemployment, Inflation